

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

Oleh

R. Haitami Lutfiatus Sahlah¹,
Ermaya Suradinata², Sampara Lukman³

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri
haitamilutfiatussahlah@gmail.com

^{2,3}Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

“IMPLEMENTATION OF INDEPENDENT RURAL NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM (PNPM) IN POVERTY ALLEVIATION IN SUKASARI SUBDISTRICT, SUMEDANG DISTRICT, WEST JAVA PROVINCE”

An independent rural National Community Empowerment Program (PNPM) is a national government policy that is nurtured as an effort to alleviate the problem of poverty and its lack of social welfare using a process participatory planning that emphasizes community empowerment. One of the programs of independent rural PNPM is the provision of capital to women in the form of savings and loan through the program namely savings and loan women (SPP). Here, this study aims to describe the implementation of independent rural PNPM in reducing the poverty in the village of Sukasari, Sumedang District, West Java Province, to analyze the implementation obstacles, and to formulate the best strategy to make rapid progress in implementing the program.

This study employs a qualitative approach with descriptive techniques in order to gain a deeper understanding of the problem. Data was collected through in-depth interviews, documentation and observation. The collected data then analyzed using the Miles and Huberman model through the steps of data reduction activities, data presentation, and drawing conclusions or verification. The strategic efforts to improve the implementation of independent rural PNPM was formulated using ASOCA analysis (Ability, Strengths, Opportunities, Culture, Agility).

The results showed that the implementation of the independent National Community Empowerment Program (PNPM) in Sukasari village was not effectively support the improvement of village community welfare and quality of human life, as well as poverty alleviation. There of, some improvements should be carried out overcome the implementation challenges to realization the poverty alleviation of Sukasari community.

Keywords: community empowerment, independent rural, national community empowerment program (PNPM), poverty alleviation, savings and loan women (SPP).

ABSTRAK

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan kebijakan nasional pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah penambahan permodalan simpan pinjam bagi kelompok usaha perempuan melalui program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya serta upaya strategis dalam meningkatkan keterlaksanaan dan keberhasilan PNPM Mandiri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif agar dapat menjawab permasalahan dengan lebih mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui alur kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Adapun upaya strategis peningkatan implementasi PNPM Mandiri dirumuskan menggunakan analisis ASOCA (Ability, Strengths, Opportunities, Culture, Agility).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan belum efektif dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan dalam upaya meningkatkan kesesuaian program nasional pemberdayaan masyarakat tersebut agar harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sukasari dapat tercapai.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, pengentasan kemiskinan, simpan pinjam kelompok perempuan (SPP)

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multidimensional. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik bahkan juga ideologi. Secara umum kondisi kemiskinan tersebut ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya, sehingga akibat dari kemiskinan itu secara sosial ekonomi menjadi beban masyarakat, rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat, menurunnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat dan kemungkinan merosotnya mutu generasi yang akan datang. Berkenaan dengan penyebab timbulnya kemiskinan Chambers dalam Kartasasmita (1996: 98) mengatakan:

“Inti dari masalah kemiskinan terletak pada apa yang disebut sebagai *deprivation trap* atau jebakan kekurangan yang disebabkan oleh beberapa faktor ketidakberuntungan, dan kerentanan serta ketidakberdayaan merupakan faktor yang sering menyebabkan keluarga miskin menjadi lebih miskin”

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara antara lain mencakup: (1) Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan dan pelayanan

kesehatan. Kemiskinan dalam hal ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar; (2) Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat, dalam hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi; (3) Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.

Di samping itu juga, Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) menjelaskan bahwa kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin, dan keterbatasan akses masyarakat miskin dalam penentuan kebijaksanaan public yang berdampak pada kehidupan mereka. Pemecahan masalah kemiskinan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan yang terpusat, tetapi perlu pemahaman konsep masyarakat miskin itu sendiri dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar mereka, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi bagian dari pelaksanaan mandate UUD 1945. Berbagai program di era 1990-an yang dimulai dari program IDT (Inpres Desa Tertinggal), Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah menunjukkan tekad pemerintah untuk mengentaskan masyarakat miskin dan sekaligus sebagai bagian dari perwujudan

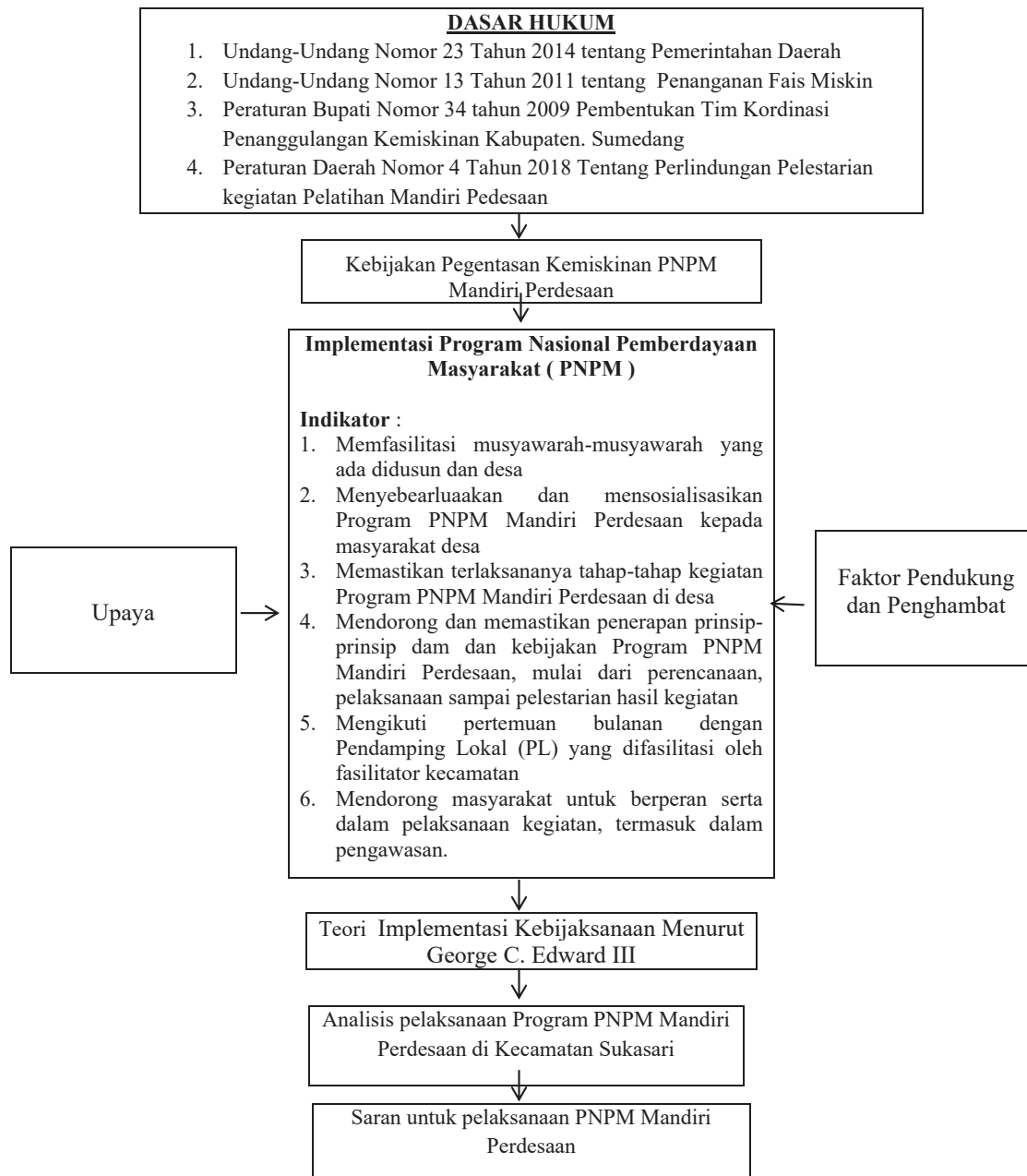
pembangunan alternatif yang melihat pentingnya manusia (masyarakat), tidak lagi sebagai objek tetapi subjek pembangunan.

Arah dan tujuan pembangunan daerah otonom yang berkeadilan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa salah satu tujuan Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Paradigma penanggulangan kemiskinan pada era Otonomi Daerah saat ini, bahwa Kebijakan atau program anti kemiskinan akan berhasil apabila kaum miskin menjadi aktor utama dalam perang melawan kemiskinan. Untuk membantu kaum miskin keluar dari kemiskinan dibutuhkan kepedulian, komitmen, kebijaksanaan, organisasi, dan program yang tepat. Diperlukan pula sikap yang tidak memperlakukan orang miskin sebagai objek, tetapi sebagai subjek.

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Sedangkan tujuannya meliputi: (1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan; (2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal; (3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif; (4) Menyediakan sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat; (5) Melembagakan pengelolaan dana bergulir; (6) Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antardesa (BKAD) dalam pengelolaan

pembangunan; dan (7) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan. Adapun perkembangan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sukasari terkait dengan Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Berdasarkan teori yang telah peneliti kumpulkan selanjutnya penelitian menentukan beberapa di antara konsep teori tersebut sebagai sebuah dasar dalam melaksanakan penelitian tentang Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dalam Penanggulangan



Gambar 1

Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan Teori Edwards III (1980)

Kemiskinan di Kecamatan Sukasari

Aturan yang menjadi dasar awal penelitian ini adalah Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 yang disahkan DPR RI pada 18 Desember 2013, yaitu pemberian alokasi dana yang besar untuk desa, dengan indikasi rata-rata 1,4 Miliar per desa per tahun. Penerapan UU tersebut tentunya memerlukan peraturan-peraturan dan pedoman untuk pelaksanaan tata kelola di tingkat desa yang mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 dan amendemennya, landasan idiil pancasila dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM MP yang akan disusun kemudian.

Penelitian ini peneliti menggunakan Analisis ASOCA untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi faktor internal dan eksternal Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.

Suradinata (2013: 18) mengemukakan bahwa analisis ASOCA, yaitu kepanjangan dari: *ability* (kemampuan), *strengths* (kekuatan), *opportunities* (peluang), *culture* (budaya), dan *agility* (kecerdasan). analisis asoca menambahkan unsur *culture* (budaya), dan *agility* (kecerdasan) sebagai unsur yang penting dalam menentukan strategi pemecahan masalah, pengambilan putusan, dan dapat dikembangkan dalam mengikuti perubahan, perkembangan zaman, dan kebutuhan.

Adapun untuk mengetahui strategi dalam mengatasi hambatan Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sukasari kabupaten Sumedang, peneliti merujuk pada teori Suradinata (2013: 61) dalam bukunya berjudul Reformasi Organisasi dan Administrasi Pemerintahan mengatakan bahwa, "Strategi dapat didefinisikan sebagai suatu cara/model/pola untuk menentukan

pencapaian tujuan, baik untuk jangka pendek, maupun jangka panjang, Strategi merupakan sasaran untuk mencapai tujuan organisasi dengan memperhitungkan sumber data, waktu, situasi kondisi". Alur pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 kerangka pemikiran di muka.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif, di mana hasil penelitian akan memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap Impelementasi PNPM Mandiri Perdesaan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat khususnya Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Menurut Irawan (2004: 60) metode deskriptif adalah jika kita ingin meneliti satu atau dua aspek dari suatu hal yang sudah terpetakan secara umum dan luas, maka kita masuk ke area penelitian yang lebih dalam.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan snowball sampling dan purposive sampling. Dengan melakukan wawancara kepada informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti dan selanjutnya dapat menunjukkan informan lain yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis menentukan informan yang akan diwawancarai untuk mendapatkan data atau informasi dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur kepada key person, yaitu pelaku yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam Implementasi Program PNPM Mandiri

Perdesaan khususnya Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Sukasari yaitu Konsultan Manajemen Kabupaten, Fasilitator Kabupaten, PJOK, Fasilitator Kecamatan (FK), Pendamping Lokal (PL), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/kampung (KPM D/K) dan Unit Pelaksana kegiatan (UPK), Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancara diminta pendapat, dan ide-idenya sehingga dalam wawancara ini peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Selain itu peneliti juga menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara bebas (*free talk*) di mana pertanyaan yang diberikan semakin terfokus pada permasalahan dan informasi yang dikumpulkan cukup mendalam, tetapi mengacu kepada instrument penelitian, sehingga nantinya informan memberikan informasi yang sebenarnya dan peneliti memperoleh pendapat, pandangan serta pola pikir terhadap masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program Simpan Perempuan (SPP) merupakan salah satu kegiatan yang didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan, dengan memberikan bantuan dana bergulir bagi kaum perempuan yang ada di Desa untuk mengelola ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat miskin di desanya dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 10-12 Orang.

Sebagai salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan PNPM Mandiri Perdesaan mengharuskan adanya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pada semua tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Kepentingan perempuan harus terwakili secara memadai dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk dalam perencanaan melalui

kelompok perempuan dan keikutsertaan perempuan dalam berbagai forum pengambilan keputusan. Jumlah kelompok awal berdasarkan SPC dana BLM, pada awal tahun 2018 sebanyak 38 kelompok dan dalam perkembangannya kenaikan sebanyak 88 kelompok.

Implementasi PNPM Mandiri perdesaan di Kecamatan Sukasari lebih difokuskan pada kegiatan pembangunan peningkatan kualitas prasarana dan sarana sosial ekonomi. Usulan kegiatan direncanakan sendiri oleh masyarakat desa dalam forum Musyawarah Antardesa (MAD) sosialisasi yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan dihadiri oleh semua perwakilan dari desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Sukasari, selain itu dilaksanakan juga kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat terutama keluarga miskin dengan pemberian modal usaha melalui kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan kaum perempuan di Kecamatan Sukasari agar lebih berdaya dengan mengembangkan potensi sosial ekonomi mereka sendiri melalui pemberian modal usaha untuk pengembangan usaha sehari-hari yang tujuannya dapat membantu mendongkrak perekonomian keluarga.

Namun untuk memperoleh pinjaman tersebut kelompok perempuan desa terlebih dahulu harus membentuk kelompok perempuan minimal sepuluh orang lengkap dengan mengajukan proposal berisi rincian: kondisi kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP); gambaran umum usaha anggota kelompok; rencana kebutuhan dana; dan daftar calon pemanfaat lengkap dengan peta sosial, usulan ini nantinya dibawa ke forum Musyawarah Desa (Mudes) perencanaan. Hal tersebut juga dibenarkan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sukasari, Wawat Karwati pada kesempatan wawancara dengan peneliti pada 14 Januari 2021 mengatakan bahwa:

“Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sampai saat ini dirasakan cukup membantu masyarakat khususnya masyarakat” miskin yang ada di Kecamatan Sukasari. Ini bisa dilihat dari beberapa kelompok SPP dalam pengembangan usahanya cukup berhasil, seperti usaha *tibo-tibo* (pedagang kecil), warung dan usaha mikro lainnya, sampai dengan saat ini jumlah kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang ada di Kecamatan Sukasari sudah 136 kelompok”.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan dalam Penanggulangan Kemiskinan

Keberhasilan implementasi PNPM mandiri perdesaan, menurut George C. Edwards III, sebagaimana ditulis oleh Winarno (2007: 174) sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana, serta struktur birokrasi dengan standar pelaksanaan kegiatan berdasarkan PTO (Petunjuk Teknis Operasional) kegiatan yang ada. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi implementasi tersebut terkait dengan Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dapat diuraikan sebagai berikut.

► Komunikasi

Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan bisa terlihat dari tingkat sosialisasi dari kebijakan tersebut, bagaimana tingkat kelengkapannya dan bagaimana jumlah informasi yang diberikan, selain itu bisa terlihat dengan bagaimana tingkat pemahaman dari para pelaksana maupun lingkungan kebijakan tentang tujuan dan sasaran dari kebijakan yang diberikan, faktor ini juga harus

menggambarkan tentang bagaimana tingkat konsistensi dari kebijakan tersebut dengan melihat kesamaan antara kebijakan yang dikomunikasikan dan kebijakan dalam pelaksanaannya.

► Sumber Daya Pelaksana

Sumber daya memiliki pengaruh yang cukup besar dalam implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sukasari, dalam hal ini ketersediaan kemampuan sumber daya kelompok SPP yang tepat untuk melaksanakan kebijakan akan memudahkan melaksanakan kebijakan.

► Faktor Disposisi/Sikap Aparatur

Disposisi merupakan kecenderungan sikap dari para pelaksana kebijakan, yang merugikan dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan, Edwards III dalam Winarno (2007: 194-202) menyebutkan indikator dalam faktor disposisi, meliputi: staf, perilaku dan pemberian insentif.

► Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pada organisasi dan hubungan antar lembaga birokrasi menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yang dijelaskan melalui fragmentasi dan tersedianya standar operating prosedur (SOP) yang berisi aturan tata aliran pekerjaan, pelaksanaan program dan koordinasi.

SIMPULAN

1. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dalam Penanggulangan Kemiskinan khususnya pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat sudah berjalan sesuai program namun belum efektif, karena sampai dengan saat ini

pengembalian dana simpan pinjam masih sangat kurang dari peserta program sehingga hal tersebut menjadi kendala atau penghambat proses keberhasilan program itu sendiri.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu dapat dibagi menjadi empat faktor antara lain faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi (sikap pelaksana) dan struktur birokrasi. Penjelasan mengenai masing-masing faktor tersebut, yaitu sebagai berikut.

a. Faktor komunikasi

Kurangnya komunikasi dan sosialisasi oleh pengurus kelompok Simpan Pinjam perempuan (SPP) kepada anggotanya.

b. Faktor Sumber Daya

Pengurus yang menangani Simpan Pinjam Perempuan (SPP) masih kurang secara kualitas maupun kuantitas.

c. Faktor Disposisi (Sikap Pelaksana)

Kurangnya pemahaman pelaksana/pengurus kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tentang pengelolaan keuangan yang baik dan benar.

d. Struktur Birokrasi

Belum adanya standar operasi yang jelas dan tegas antara pengguna kelompok SPP dengan anggotanya sehingga menghambat pelaksanaan Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan dalam Penanggulangan Kemiskinan.

3. Strategi yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengefektifkan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan:

a. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerja sama antar OPD

terkait dengan penyuluh atau fasilitator dari Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) serta melibatkan masyarakat yang bertindak sebagai peserta Program.

b. Menerapkan sistem dan nilai PNPM Mandiri Perdesaan (perencanaan partisipatif, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan) ke dalam pelaksanaan pembangunan daerah jangka menengah agar dapat diukur skala prioritas pelaksanaannya.

c. Memberikan penguatan kelembagaan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melalui pembinaan administrasi dan manajemen, pelatihan keterampilan oleh UPK dan OPD terkait.

d. Memaksimalkan peran Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan untuk mendukung keberhasilan Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan dengan sarana dan prasarana yang memadai.

e. Memperkuat jaringan kemitraan antara Badan Kerja Sama Antardesa (BKAD) dengan pihak-pihak lain.

f. Melakukan sosialisasi dan pematapan terhadap keberadaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada calon peserta SPP.

g. Mendorong dunia usaha/swasta untuk berperan aktif dalam program penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan wawasan dan kesadaran masyarakat terkait bahaya dan dampak kemiskinan agar terbangun pola pikir masyarakat yang maju dan berkembang.

SARAN

1. Untuk mengoptimalkan Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP), hendaknya dilakukan evaluasi kebijaksanaan secara periodik untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam implementasi kebijaksanaan tersebut.

2. Dalam rangka mengefektifkan Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan melalui kegiatan Simpan Pinjam perempuan (SPP), maka Pemerintah Daerah perlu memaksimalkan kembali faktor komunikasi, sumber daya, faktor disposisi/sikap pelaksana dan struktur birokrasi agar pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan melalui Simpan Pinjam Perempuan atau program sejenis pada masa-masa yang mendatang dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat sebagai suatu upaya penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana.
3. Strategi dalam mengefektifkan Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan terkait dengan pengembangan pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP), berdasarkan penelitian penulis adalah meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerja sama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
4. Diharapkan kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi terkait dengan Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rieka Cipta, Jakarta.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- Nugroho, Riant, 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Amirin, M.Tatang, 2000, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan, Bungin, 2006, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bryson, m. John. 2007, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Edwards III, George C, 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington D.C
- Irawan, Prasetya, 2006, *Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada masyarakat*, BAPPENAS, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi kedua*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu, 2000, *Ilmu Pemerintahan Jilid I, II, III, IV* BKU-Ilmu Pemerintahan, Jakarta.
- Pamudji, S., 1985, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bina Aksara Jakarta.
- Pranarka, AMW dan Prijonno, Onny S, 1996, *Pemberdayaan, Konsep Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.
- Riduwan, 2004, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2007, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- , 2007, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Supriatna, Tjahya, 2000, *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*, PT Humaniora Utama Press, Bandung.

-----, 2000, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Suradinata, Ermaya, 2013, *Reformasi Organisasi dan Administrasi Pemerintahan*. PD. Super Express, Jakarta.

-----, 2013, *Analisis Kepemimpinan (Strategi Pengambilan Keputusan)*, Jatinangor: Alqaprint, Sumedang/Bandung.

Wasistiono, Sadu, 2003, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, CV. Fokusmedia, Bandung.

Wicaksono, Kristian Widya, 2006, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Usman, Sunyoto, 2008, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.